

DAMPAK KETIMPANGAN GENDER TERHADAP SDGs (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS)

Dendi Saputra¹, Rego Bangkito², Dwi Putri Lestarika³^{1,2,3} Prodi Hukum, Universitas Bengkulu, Jalan WR. Soeprtaman, Bengkulu 38371, Indonesia
dsaputradendi28@gmail.com, regobangkito01@gmail.com, dwipfhunib22@unib.ac.id
e-mail Corresponding : dsaputradendi28@gmail.com

Abstrak

Semua orang pada dasarnya memiliki hak yang setara tanpa dipengaruhi oleh ras, suku, agama, ataupun status gender. Negara wajib untuk melindungi dan menghormati kesetaraan gender dalam mengakses berbagai hak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat ketimpangan gender di Indonesia serta dampak ketimpangan gender terhadap Sustainable development goals. Penelitian menggunakan pendekatan literatur review yang didukung yuridis normatif, sumber data yang digunakan adalah sumber hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan metode studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan gender masih kerap terjadi di Indonesia hal ini didukung oleh indikator seperti ketimpangan jumlah pekerja formal laki-laki dan perempuan, kecilnya persentase perempuan yang menduduki posisi manager, serta ketimpangan tingkat penyelesaian pendidikan antar gender. Ketimpangan gender memiliki dampak signifikan terhadap SDGs, ketimpangan gender tidak hanya menjadi hambatan bagi kesetaraan gender (SDGs 5), tetapi juga berpengaruh terhadap tujuan-tujuan lainnya.

Kata kunci: Dampak; Ketimpangan Gender; Sustainable Development Goals

Abstract

All people have equal rights regardless of race, ethnicity, religion or gender status. The state is obliged to protect and respect gender equality in accessing various rights. This research aims to examine the level of gender inequality in Indonesia and the impact of gender inequality on sustainable development goals. The research uses a literature review approach supported by normative juridical, the data sources used are primary and secondary legal sources collected by the literature study method. The results showed that gender inequality still often occurs in Indonesia, this is supported by indicators such as inequality in the number of male and female formal workers, the small percentage of women who occupy managerial positions, and inequality in the level of educational completion between genders. Gender inequality has a significant impact on the SDGs, gender inequality is not only an obstacle to gender equality (SDG 5), but also affects other goals.

Keywords: Impact; Gender inequality; Sustainable development goals

Article History

Received: November 2024
Reviewed: November 2024
Published: November 2024
Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

1. Pendahuluan

Pencapaian Sustainable Development Goals (Selanjutnya disebut SDGs) adalah target global untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dengan mempromosikan keadilan, kesejahteraan, dan perdamaian bagi seluruh umat manusia, (Iskandar dalam Aziz & Najicha, 2024). Pencapaian SDGs bila dihadapkan pada kebudayaan dan tatanan sosial masyarakat mendapat hambatan berupa kesenjangan gender. Ketimpangan gender dalam SDGs termasuk dalam daftar penghambat target tersebut, ketimpangan gender tidak hanya merugikan perempuan dan anak perempuan, tetapi juga mengurangi potensi

pembangunan secara keseluruhan. Ketimpangan gender berimplikasi terhadap keterbatasan akses perempuan dalam menjangkau pendidikan, membuat ketidaksetaraan dalam dunia kerja, peningkatan kekerasan terhadap perempuan, dan dampak buruk lainnya. Sejalan dengan fakta tersebut ketimpangan gender telah dikualifikasi sebagai hambatan signifikan untuk mencapai SDGs. Sejatinya Ketimpangan gender lahir karena konsep gender dalam masyarakat.

Konsep gender berkaitan erat dengan peran, perilaku, dan tanggung jawab seseorang yang dikaitkan dengan jenis kelamin yang dikonstruksikan secara sosial. Dalam konsep gender umumnya terjadi dikotomi sektor publik serta sektor domestic, pembagian ini berakibat terhadap pembagian peran dan hak dalam masyarakat dan tugas yang merupakan produk kebudayaan, gender sangat dipengaruhi oleh faktor kebudayaan sehingga setiap wilayah adat memiliki perbedaan peran, hak, dan status yang dilekatkan dengan gender. Dalam perkembangannya konsep gender melahirkan ketimpangan gender, (Abdullah, 2003). Ketimpangan gender terjadi ketika terdapat perbedaan perlakuan, akses, dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan yang pada umumnya mengakibatkan kerugian bagi perempuan dan anak perempuan. Akan tetapi dalam beberapa kasus ketimpangan gender juga dialami oleh kaum laki-laki. Sebagai respons terhadap ketimpangan gender muncul konsep kesetaraan gender yang terus diperjuangkan, kesetaraan gender mengutamakan persamaan hak, kesempatan, dan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam semua aspek kehidupan dengan kesetaraan gender dapat mendukung target SDGs.

SDGs merupakan rangkaian tujuan global yang menetapkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang harus dicapai oleh semua negara pada tahun 2030 yang pada pokoknya adalah ajakan mendesak untuk aksi oleh semua negara berkembang dan maju dalam kemitraan global, (Dwiastuti et al., 2022) oleh negara anggota PBB, negara-negara ini menyadari bahwa menghapus kemiskinan beserta kekurangan lainnya harus beriringan dengan strategi untuk memperbaiki pendidikan dan kesehatan, mempersempit kesenjangan, serta memicu pertumbuhan ekonomi, disertai dengan upaya mengatasi perubahan iklim dan bekerja untuk melestarikan hutan dan lautan, (Afandi dalam Aziz & Najicha, 2024). Adapun 17 tujuan yang diinginkan dicapai dalam SDGs terdiri atas berbagai tujuan- tujuan seperti diantaranya kesetaraan gender, menghapus kemiskinan, menghilangkan ketimpangan, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya tujuan SDGs dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1. Sustainable Development Goals (SDGs)

(sumber: diolah dari internet)

Sayangnya, Konsep kesetaraan gender dalam tatanan masyarakat sulit berkembang dan diterima dengan baik karena pembagian porsi-porsi masing-masing gender. Pembagian ini berakibat kepada ketimpangan gender, Ketimpangan gender merupakan tantangan signifikan dalam mencapai SDGs. Ketimpangan gender mengakibatkan perempuan dan anak perempuan memiliki akses yang terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Hal ini mengurangi potensi mereka untuk berkontribusi pada pembangunan dan menghalangi tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Ketimpangan gender juga menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial yang signifikan, mengurangi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian tentang ketimpangan gender dan SDGs bukanlah hal yang baru. Beberapa penelitian terhadap topik ini telah dilakukan di India (Amulya Jeevanasai et al., 2023), selain itu penelitian sejenis juga dilakukan di Indonesia seperti penelitian ketimpangan disertai peningkatan kesetaraan gender dalam SDGs (Larashati, 2022), Penelitian terhadap kesetaraan gender dan SDGs (Cahyadi, 2019), permasalahan kekerasan berbasis gender dan pencapaian kesetaraan dalam SDGs (Munasaroh, 2022), partisipasi perempuan dalam ekonomi kreatif untuk mewujudkan SDGs (Khairunnisa et al., 2022), dan penelitian lainnya. Namun, masih terbatasnya penelitian yang menganalisis hubungan antara ketimpangan gender dan SDGs di Indonesia. Selain itu, penelitian-penelitian terdahulu cenderung meneliti beberapa variabel terkait SDGs sehingga penelitian yang terfokus pada aspek ketimpangan gender dalam SDGs jarang dilakukan. Penelitian semacam ini dibutuhkan untuk mendukung upaya untuk mencapai target SDGs. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan gender dalam konteks pencapaian SDGs di Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan gender, dan merumuskan solusi yang komprehensif untuk mengatasi ketimpangan gender dan mendorong tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak lain yang berkepentingan dalam menjalankan upaya pencapaian SDGs di Indonesia.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode *literatur review* yang didukung dengan metode yuridis normatif untuk mengkaji lebih mendalam mengenai ketimpangan gender dalam Sustainable development goals. *Literatur review* ialah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, dan sintesis dari beberapa sumber literatur yang relevan, (Febriansyah, 2024). Metode penelitian di dukung dengan sumber data primer dan sekunder yang terdiri atas peraturan perundang-undangan serta data sekunder meliputi artikel jurnal, laporan, buku dan berbagai sumber terpercaya. Metode pengumpulan data dengan studi pustaka, data yang diperoleh dikumpulkan, dianalisis serta disistematisasikan secara kualitatif untuk menghasilkan gambaran mengenai ketimpangan gender dalam SDGs dan di sempurnakan dengan metode berpikir induktif. Penelitian di lakukan pada tanggal 28 September hingga 10 November 2024

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Ketimpangan gender

Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi kesetaraan hak antar laki-laki dan perempuan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia. Beberapa peraturan Indonesia telah menggariskan pengakuan hak hak perempuan seperti UU no.7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW), selain itu perlindungan hak juga dilindungi oleh UU no.39 Tahun 1999 tentang HAM, dan beberapa peraturan lainnya. Kesetaraan gender menjadi suatu hal yang wajib dicapai, tetapi dalam realitasnya kondisi sebaliknya kerap terjadi sebagai akibat dari suburnya budaya patriarki dalam masyarakat dan konsep gender yang mengakar.

Ketimpangan gender di Indonesia disebabkan oleh kontruksi sosial serta masyarakat yang masih kental dengan tradisi dan budaya yang berdasar pada paham patriarki sehingga menciptakan diskriminasi terhadap perempuan, (Larashati, 2022). Budaya ini memposisikan laki-laki sebagai pihak yang memonopoli kekuasaan dan dominan, jika dibandingkan dengan perempuan yang berakibat pada penindasan disertai eksploitasi perempuan, (Sulistiyowati, 2021). Budaya patriarki menutup potensi dan ruang gerak perempuan pada berbagai aspek sehingga menjadi sangat terbatas dan terhambat, (Gusmansyah, 2019). Selain itu, ketimpangan gender juga dapat disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti ekonomi, sosial, kebudayaan dan faktor-faktor lain. Hasil penelitian memunculkan fakta bahwa hingga kini ketimpangan gender masih terjadi secara massif dan merambah kedalam berbagai cakupan tatanan sosial mulai dari sektor pendidikan, ketenagakerjaan, masyarakat, dan keluarga, (Larashati, 2022). Temuan ini juga didukung oleh data BPS berikut :

Tabel 1. Perbandingan tenaga kerja formal perempuan dan laki-laki

Jenis Kelamin	Presentase Tenaga Kerja Formal Menurut Jenis Kelamin	
	2022	2023
Laki-laki	43,97	44,19
Perempuan	35,57	35,75

Sumber : BPS, 2024

Berdasarkan Tabel 1 dapat disimpulkan bahwa perempuan memiliki angka presentase tenaga kerja formal yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Presentase tenaga kerja formal laki-laki sebesar 44,19 persen pada tahun 2023 dan 43,97 pada tahun 2022, hal ini menunjukkan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya, presentase ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan presentasi tenaga kerja formal perempuan, pada tahun 2023 presentase perempuan hanya sebesar 35,75 mengalami peningkatan memang jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya sebesar 35,57. Akan tetapi jumlah tersebut tidak cukup untuk mengimbangi jumlah tenaga kerja formal laki-laki. Hal ini disebabkan perempuan umumnya bekerja pada sektor informal seperti pekerja bebas, pekerja keluarga, dan pekerjaan lainnya pada sektor informal, (Larashati, 2022). Ketimpangan seperti yang digambarkan tabel diatas terjadi karena perempuan mendapatkan hambatan untuk melakukan mobilitas ke sektor formal yang disebabkan tanggungjawab rumah tangga, keterbatasan partisipasi dalam kehidupan ekonomi, status subordinasi, dan keterbatasan partisipasi dalam masyarakat.

Selain itu, Ketimpangan terhadap perempuan juga dilatarbelakangi oleh budaya, kondisi sosial. Pada beberapa wilayah tertentu di Indonesia kondisi sosial budaya yang berkembang memberikan tuntutan bagi kaum perempuan agar mengutamakan urusan rumah dari pada mencari penghidupan, (Larashati, 2022). Di sisilain hal ini juga mendapatkan pengaruh dari pola asuh anak perempuan oleh orang tua dan diperparah perspektif masyarakat yang menganggap perempuan bekerja adalah tabu, (Nuraeni & Lilin Suryono, 2021). Masyarakat beranggapan bahwa IRT (Ibu Rumah Tangga) merupakan posisi paling ideal bagi seorang perempuan, meskipun ia adalah seorang sarjana, (Sulistiyowati, 2021). Lebih jauh lagi ketimpangan gender juga dindikasikan tingkat penyelesaian pendidikan, ketimpangan gender dalam konteks penyelesaian pendidikan, data BPS menunjukkan bahwa ketimpangan akses terhadap atas pendidikan justru dialami oleh laki-laki. Tingkat penyelesaian pendidikan dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2 Perbandingan tingkat Penyelesaian pendidikan antara perempuan dan laki-laki

Tahun	Tingkat penyelesaian pendidikan menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin					
	SD/Sederajat		SMP/Sederajat		SMA/Sederajat	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
2021	97,00	97,76	87,04	90,78	68,48	67,46
2022	97,44	98,21	88,64	91,71	64,09	68,31
2023	97,47	98,19	88,86	92,10	64,14	69,54

Sumber Data :BPS, 2022

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa laki-laki memiliki angka penyelesaian pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan perempuan. Pada jenjang SD/Sederajat misalnya di pada tahun 2022 angka presentase penyelesaian pendidikan sebesar 97,44 hal ini kemudian meningkat sebesar 0,07 pada tahun 2023, apabila dibandingkan dengan presentase perempuan pada jenjang pendidikan dan tahun yang sama. Pada tahun 2022 perempuan memiliki angka penyelesaian sebesar 98,21 dan pada tahun 2023 menurun menjadi 98,19. Pada jenjang SMP pula pelajar laki-laki pada tahun 2022 memiliki angka presentase sebesar 88,64 dan sebesar 88,86 pada tahun 2023, sedangkan perempuan pada tahun yang sama secara berurut memiliki angka penyelesaian pendidikan sebesar 91,71 dan 92,10. Kemudian pada jenjang SMA/Sederajat, laki-laki mempunyai angka penyelesaian pendidikan sebesar 64,09 pada tahun 2022 dan meningkat menjadi 64,14 pada tahun 2023, sedangkan perempuan memiliki angka yang jauh lebih besar yakni 68,31 pada tahun 2022 dan sebesar 69,54 pada tahun 2023. Meskipun kesenjangan terhadap akses pendidikan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, akan tetapi data tersebut menunjukan bahwa terdapat kesenjangan rasio penyelesaian pendidikan antara laki-laki dan perempuan yang berimplikasi terhadap SDGs. Selain itu, kesenjangan gender di Indonesia juga dapat ditinjau melalui presentase laki-laki dan perempuan yang menempati posisi manager dalam suatu perusahaan. Berikut disajikan tabel jumlah presentase perempuan yang dapat menjadi manager :

Tabel 3 Perbandingan proporsi perempuan yang berada di posisi managerial

Daerah Tempat Tinggal	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial, menurut Daerah Tempat Tinggal		
	2021	2022	2023
Perkotaan	32,90	32,71	35,04
Perdesaan	31,48	31,02	34,95
Perkotaan + Perdesaan	32,50	32,26	35,02

Sumber : Susenas

Data pada tabel 3 menunjukan rendahnya presentase perempuan yang mencapai posisi managerial pada tempat tinggal desa dan kota. Data pada Tabel 3 menunjukkan peningkatan

proporsi perempuan yang menduduki posisi manajerial, baik di perkotaan maupun pedesaan, dari 32,71% menjadi 35,04% di perkotaan dan 31,02% menjadi 34,95% di pedesaan pada tahun 2023. Meskipun terjadi peningkatan setiap tahunnya, rata-rata persentase perempuan yang menempati posisi manajerial masih berkisar di angka 30%-40%, jauh dari proporsi yang seimbang jika dibandingkan dengan laki-laki. Fakta ini mengindikasikan adanya ketimpangan gender yang masih melekat dalam dunia ketenagakerjaan, di mana perempuan cenderung mengalami diskriminasi dan subordinasi dalam mendapatkan akses dan kesempatan untuk menempati posisi kepemimpinan. Fakta-fakta tersebut menjadi indikator kuat bahwa masih terdapat ketimpangan gender di Indonesia, Ketimpangan gender sendiri menjadi salah satu faktor yang berdampak terhadap pencapaian SDGs. Ketimpangan gender akan menghambat pemenuhan 17 tujuan global yang ingin dicapai melalui SDGs.

3.1 Dampak Ketimpangan gender terhadap SDGs

Ketimpangan gender mempunyai dampak yang signifikan terhadap SDGs. Terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, peluang finansial, dan kemiskinan lebih dominan berpengaruh terhadap perempuan jika dibandingkan dengan laki-laki, berdasarkan sebuah studi, (Woman dalam Amulya Jeevanasai et al., 2023). Bukti dari beberapa negara menemukan bahwa kesenjangan gender menjadi hambatan besar dalam mencapai SDGs, utamanya di lapangan-lapangan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pendidikan serta Kesehatan, dan lapangan yang meningkatkan kesejahteraan, (UNDP dalam Amulya Jeevanasai et al., 2023), sejatinya kesetaraan gender termasuk dalam daptar tujuan-tujuan SDGs, sehingga kesenjangan gender akan sangat berdampak terhadap tujuan kesetaraan gender. Lebih jauh lagi ternyata kesenjangan gender memiliki dampak yang lebih luas, menjadikan kesetaraan gender berdampak terhadap seluruh tujuan SDGs baik secara langsung ataupun tidak langsung. Akan tetapi terdapat beberapa SDGs yang mendapatkan dampak terburuk diantaranya SDGs 1, SDGs 5, SDGs 3, dan SDGs 10.

Ketimpangan gender memiliki dampak buruk terhadap tujuan tanpa kemiskinan yang terdapat dalam SDGs 1. Kesenjangan menjadi faktor yang menyebabkan tingginya kemiskinan ekstrem, yang secara tidak proporsional memberi pengaruh terhadap anak perempuan dan perempuan. Jumlah orang yang hidup dibawah garis kemiskinan eksrem mengalami pengurangan sebelum pandemi, hal ini menandakan kesuksesan dalam menanggulangnya. Pada tahun 2013 sebesar 11,2% berkurang menjadi 8,6% pada tahun 2018, artinya jumlah orang yang bertahan hidup dengan gaji kurang dari seminggu mengalami penyusutan. Walaupun pandemik menghentikan tren ini, perlu diantisipasi pada akhir tahun 2022, sekitar 383 juta perempuan dan anak perempuan tidak dapat terlepas dari kemiskinan ekstrim. Hal ini disebabkan keterbatasan akses terhadap perawatan medis, pendidikan, serta keterbatasan terhadap peluang kerja, anak perempuan dan perempuan mendapat pangaruh besar dari kemiskinan ekstrim. SDGs 1 mempunyai harapan untuk menghapus kemiskinan dari semua dimensi dan manifestasinya, termasuk kemiskinan ekstrim pada tahun 2030 serta kesetaraan gender berperan penting dalam mewujudkan tujuan ini. Sangat penting guna mencapai kesetaraan gender dengan SDGs 5 guna menghapus kemiskinan dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, (Bank Dunia dalam Amulya Jeevanasai et al., 2023). Selain mempunyai pengaruh besar terhadap SDGs 1, kesenjangan gender juga memberikan dampak signifikan terhadap tujuan kesejahteraan dan Kesehatan yang baik sesuai SDGs 3.

Kesenjangan gender memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian SDG 3, yaitu tujuan kesehatan dan kesejahteraan yang baik. Perempuan, yang seringkali menjadi korban diskriminasi dalam akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, lebih rentan terhadap berbagai masalah kesehatan, (Apriyanti, 2021). Ketimpangan gender dalam akses terhadap layanan kesehatan reproduksi dan maternal menyebabkan tingginya angka kematian ibu dan bayi. Perempuan juga lebih rentan terhadap penyakit menular seksual dan kekerasan seksual, yang berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental mereka, (Rony & Yusuf, 2024). Kesenjangan gender dalam akses terhadap nutrisi dan layanan kesehatan juga

berdampak pada kesehatan anak-anak, terutama anak perempuan. Perempuan yang memiliki akses terbatas terhadap layanan kesehatan dan pekerjaan cenderung memiliki status kesehatan yang lebih buruk, dan mereka lebih rentan terhadap penyakit kronis. Sebagaimana dijelaskan dimuka Kesenjangan gender juga berdampak terhadap SDGs 10 yakni tujuan untuk mengurangi ketimpangan.

Kesenjangan gender menjadi salah satu dari bentuk ketimpangan paling nyata dan berdampak negatif terhadap pencapaian SDG 10, yaitu tujuan untuk mengurangi ketimpangan di seluruh dunia. Perempuan dan anak perempuan seringkali menghadapi diskriminasi dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, kepemilikan aset, dan sumber daya ekonomi lainnya, yang menyebabkan mereka terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan ketidaksetaraan. Ketimpangan gender dalam pendapatan dan kekayaan juga menghambat perempuan untuk mencapai potensi penuh mereka dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang inklusif. Selain itu, perempuan seringkali menjadi korban kekerasan dan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, yang menghambat mereka untuk menikmati hak-hak dasar dan mencapai kehidupan yang layak. Untuk mencapai tujuan SDGs, perlu diambil upaya-upaya untuk melindungi masing-masing gender dari diskriminasi utamanya perempuan. Kemudian puncaknya ketimpangan gender menjadi musuh terbesar bagi tercapainya SDGs 5.

Kesenjangan gender merupakan penghalang utama dalam mencapai SDG 5, yaitu tujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, kepemilikan aset, dan partisipasi politik menyebabkan perempuan dan anak perempuan terpinggirkan dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini menghambat perempuan untuk mencapai potensi penuh mereka, berkontribusi pada pembangunan, dan menikmati kehidupan yang setara dengan laki-laki. Kesenjangan gender juga berdampak negatif pada keluarga, masyarakat, dan perekonomian secara keseluruhan. Untuk mencapai SDG 5, diperlukan upaya yang komprehensif dalam mengatasi berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan, meningkatkan akses mereka terhadap sumber daya dan kesempatan, serta memberdayakan mereka untuk mengambil peran aktif dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan.

4. Simpulan

Meskipun Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam berbagai bidang, realitas ketimpangan gender masih menghantui, terbukti dari disparitas jumlah tenaga kerja formal antara laki-laki dan perempuan, rendahnya persentase perempuan di posisi manajerial, dan kesenjangan angka penyelesaian pendidikan di hampir semua jenjang. Kondisi ini menjadi bukti kuat bahwa kesetaraan gender belum sepenuhnya terwujud di Indonesia. Dampaknya pun terasa begitu luas, tidak hanya menghambat pencapaian kesetaraan gender (SDGs 5), tetapi juga berdampak pada tercapainya tujuan SDGs lainnya seperti kesehatan dan kesejahteraan (SDGs 3), pengurangan kesenjangan (SDGs 10), perempuan yang terjebak dalam lingkaran ketimpangan gender rentan terjerumus dalam kemiskinan, hal ini akan menghambat tujuan pengentasan kemiskinan (SDGs 1). Sehingga upaya untuk mengatasi praktik ketimpangan gender harus segera dilakukan. Untuk mengatasi praktik ketimpangan gender, perlu dilakukan upaya komprehensif yang melibatkan reformasi kebijakan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penegakan hukum yang tegas. Peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan, pelatihan, dan kesempatan kerja yang lebih baik, serta penghapusan diskriminasi dalam pengupahan dan lingkungan kerja, menjadi langkah strategis untuk menciptakan lingkungan yang adil dan setara bagi semua jenis kelamin.

Daftar Referensi

- abdullah, I. (2003). Penelitian Berwawasan Gender Dalam Ilmu Sosial. *Humaniora*, 15(2), 265–275.
- Amulya Jeevanasai, S., Saole, P., Rath, A. G., Singh, S., Rai, S., & Kumar, M. (2023). Shades & Shines Of Gender Equality With Respect To Sustainable Development Goals (Sdgs): The Environmental Performance Perspectives. *Total Environment Research Themes*, 8, 100082.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/J.Totert.2023.100082>
- Apriyanti, D. A. (2021). Perlindungan Perempuan Dan Pernikahan Di Bawah Umur. *Pampas: Journal Of Criminal Law*, 2(1), 115–124. <https://doi.org/10.22437/Pampas.V2i1.12676>
- Aziz, S., & Najicha, F. U. (2024). Peran Pendidikan Pancasila Dalam Mewujudkan Cita-Cita Sustainable Development Goals (Sdgs) Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(1), 11–21. <https://doi.org/10.31571/Jpkn.V8i1.5567>
- Cahyadi, A. D. (2019). Sustainable Development Goals (Sdgs) Dan Kesetaraan Gender. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://sciteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/red2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isallowed=Y%0ahttp://dx.doi.org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari
- Dwiastuti, I., Raharyo, A., Farid, M., & Baskoro, R. (2022). Komitmen Indonesia Dalam Implementasi Sdgs Nomor 5 Untuk Menjamin Keamanan Manusia Khususnya Perempuan (2015-2021). *International Relations Journal*, 14(27), 1–17. <https://ojs.uph.edu/index.php/jhiv/article/view/5901>
- Febriansyah, R. (2024). *Literatur Review*. International Journal Lab. <https://internationaljournallabs.com/blog/literature-review/>
- Gusmansyah, W. (2019). Dinamika Kesetaraan Gender Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia. *Hawa*, 1(1). <https://doi.org/10.29300/Hawapsga.V1i1.2233>
- Khairunnisa, I. N., Putranti, I. R., & Hanura, M. (2022). Partisipasi Perempuan Indonesia Dalam Ekonomi Kreatif Untuk Mewujudkan Sustainable Development Goals. *Journal Of Interna-Onal Rela-Ons*, 8(5), 385–395.
- Larashati. (2022). Ketimpangan Dan Peningkatan Kesetaraan Gender Dalam Sdgs (Sustainable Development Goals). *Jurnal Sains Edukatika Indonesia*, 4(2), 55–61.
- Munasaroh, A. (2022). Problematika Kekerasan Berbasis Gender Dan Pencapaian Gender Equality Dalam Sustainable Development Goals Di Indonesia. *Ijougs: Indonesian Journal Of Gender Studies*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/10.21154/Ijougs.V3i1.3524>
- Nuraeni, Y., & Lilin Suryono, I. (2021). Analisis Kesetaraan Gender Dalam Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1), 68–79. <https://doi.org/10.35967/Njip.V20i1.134>
- Rony, Y., & Yusuf, H. (2024). Tinjauan Kriminologis Terhadap Kekerasan Seksual Pada Perempuan. *Jicn*, 1(2), 1868–1877.
- Sulistyowati, Y. (2021). Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan Dan Tata Sosial. *Ijougs: Indonesian Journal Of Gender Studies*, 1(2), 1–14. <https://doi.org/10.21154/Ijougs.V1i2.2317>